

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Kewenangan	22
B. Pengawasan	26
C. Independensi.....	31
D. Tindak Pidana Korupsi	33
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Uraian Kasus.....	39
B. Reaksi dari Pembentukan Dewan Pengawas Dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	40

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Adanya Dewan Pengawas Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi	54
B. Upaya Pemerintah Mengatasi Problematika Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Adanya Dewan Pengawas	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA 75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**LAMPIRAN**

DAFTAR SINGKATAN

KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BPK	adalah Badan Pemeriksa Keuangan
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
UNCAC	adalah <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
KEMINFO	adalah Kementerian Informasi
RUU	adalah Rancangan Undang Undang
PERPPU	adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
ICW	adalah <i>Indonesia Corruption Watch</i>
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar dan seterusnya.